

KESEJAHTERAAN KELUARGA PETANI MENGAPA SULIT DIWUJUDKAN ?

Oleh : Euis Sunarti dan Ali Khomsan

A. Petani: Mengapa Terpuruk ?

Ada pameo yang mengatakan: *"kalau ingin hidup tenang jadilah petani, kalau ingin dihormati jadilah pegawai negeri, dan kalau ingin kaya jadilah pedagang"* Nampaknya kini pameo tersebut sudah tidak sepenuhnya berlaku. Kehidupan petani jauh dari kesan tenang dan sejahtera. Bahkan menurut Sastraatmadja (2006) petani hidup dalam suasana ketertinggalan dengan kondisi kehidupan yang mengesankan. Kita yang selalu bangga mengklaim diri sebagai bangsa agraris dan atau negara maritim, ternyata setelah sekian lama membangun, masih belum meraih kemakmuran dari kedua bidang tersebut. Impor beras dan produk-produk pertanian lainnya masih saja terjadi.

Kesan kuat yang muncul sekarang ini adalah bahwa petani merupakan profesi inferior, dan sektor pertanian identik dengan sektor marjinal. Kesan tersebut tidak sepenuhnya salah karena data secara umum menunjukkan hal tersebut. Padahal pada tahun 1970-an antara kesejahteraan petani dengan kesejahteraan tenaga kerja industri tidak begitu jauh berbeda. Namun kini, keadaan tidak lagi berpihak pada petani. Industri melaju jauh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Serapan tenaga kerja pertanian memang bertambah, namun kalau sektor pertanian lebih banyak dijejali dengan petani gurem maka sektor pertanian akan menjadi penyumbang kemiskinan yang signifikan. Dalam periode 10 tahun antara 1993-2003 jumlah petani gurem yang semula 10,8 juta telah bertambah menjadi 13,7 juta orang. Oleh karenanya kesejahteraan petani hingga kini masih merupakan mimpi. Pada tahun 2002 dari total penduduk miskin di Indonesia, lebih dari separonya adalah petani yang tinggal di pedesaan. Jumlah rumah tangga pertanian pada tahun 2003 adalah 24,3 juta, sekitar 82,7% di antaranya termasuk kategori miskin. Demikian juga data persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas menurut provinsi/kabupaten/kota dan sektor bekerja pada tahun 2003 (BPS, 2004) menunjukkan prosentase terbesar penduduk miskin hampir di seluruh kabupaten/provinsi adalah bekerja di sektor pertanian.

Sektor pertanian terus saja terpuruk, sehingga nasib petani tak kunjung sejahtera. Pendapatan keluarga petani disinyalir hanya Rp 500 ribu per bulan sehingga kemiskinan petani menjadi masalah kronis yang sulit terpecahkan. Ketua HKTI pernah mengkritisi kebijakan pertanian yang belum konsisten antar instansi. Contohnya adalah penetapan harga dasar gabah. Kebijakan Deptan untuk menetapkan harga dasar gabah adalah untuk mensejahterakan petani, namun di tempat lain Deperindag membuka kran impor beras sehingga petani tak bisa menikmati harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara Bulog belum berperan sebagaimana yang diharapkan sebagai penyangga harga gabah dan mengamankan harga beras. Selain itu nasib petani semakin tidak menentu karena bencana alam seperti banjir atau kekeringan yang menyebabkan hancurnya persawahan. Tampaknya nasib petani Indonesia belum secerah yang diharapkan, mereka harus rela hidup prihatin entah sampai kapan.

Besarnya angka kemiskinan di sektor pertanian, mungkin juga berkaitan dengan kemampuan pertanian sebagai buffer pengangguran. Di masyarakat, mata pencaharian sebagai petani kadang digunakan sebagai perlindungan dari status pengangguran. Daripada disebut nganggur, ya mendingan bekerja di pertanian, walau dengan ala kadarnya dan dengan curahan waktu dan kapasitas yang sangat minimal. Hal tersebut

turut menjelaskan laporan dalam *World Development Report 2003*, dimana penduduk desa yang tinggal di area “fragile” (dan umumnya bermata pencaharian petani), meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun ini.

Telah banyak dilakukan penelitian dan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan petani. Salah satu diantaranya adalah kesulitan pembiayaan usahatani dan kebutuhan dana *cash* untuk keperluan hidup selama masa menunggu penjualan hasil panen, menyebabkan banyak petani terjebak sistem ijon dan atau hutang kepada para tengkulak yang mematok harga pertanian dengan harga rendah, dimana para petani sudah tidak memiliki *bargaining position* lagi. Demikian halnya dengan rendahnya produktivitas petani kecil sebagai konsekuensi beragam masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia petani, penyusutan luas lahan produksi, tidak memadainya sarana produksi dan prasarana yang dibutuhkan usaha tani yang efisien, dan berbagai masalah lainnya. Merujuk *World Development Report 2003*, penduduk desa miskin yang umumnya petani berhadapan dengan beberapa tantangan yang mempengaruhi potensi pembangunan/perkembangannya yaitu : 1) terbatas bahkan rusaknya sumberdaya alam, 2) terbatasnya kebijakan dalam pengembangan teknologi produksi dan proses “secondary crops”, 3) jeleknya infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi) dan tidak memadainya perhatian dari institusi pembangunan (pendidikan, kesehatan, investasi), 4) marjinalnya Social budaya (kekuasaan, suara, hak tanah, tenure) dan terbatasnya kesempatan ekonomi lokal (pertanian, off-farm, kesempatan kerja di kota). Demikian banyak permasalahan yang dihadapi petani kecil dan miskin, menyebabkan kedaulatan petani semakin jauh dan sepertinya masih sekedar wacana dan angan-angan.

B. Petani Sejahtera : Penyimpangan Positif ?

Dibalik kuatnya kesan keterpurukan kehidupan petani, dalam kenyataannya di lapang terdapat sekelompok petani yang maju dan hidupnya sejahtera. Namun karena jumlahnya yang relatif sedikit, keragaan sekelompok petani maju tersebut seakan-akan seperti sebuah penyimpangan yang positif (meminjam istilah yang berkembang dalam penelitian pertumbuhan dan perkembangan psikososial anak “positive deviance”). Bayangan yang segera muncul dalam mengasosiasikan petani sukses adalah kepemilikan lahan yang luas. Padahal tidak semuanya demikian. Petani ikan hias atau petani tanaman hias terkadang memiliki lahan yang relatif sempit atau tidak jauh berbeda dengan petani tanaman pangan pada umumnya, namun bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Bagi petani maju, kepemilikan lahan yang luas bisa disebabkan baik karena kemampuannya mempertahankan asset yang sudah dimiliki dan diturunkan keluarga besar (warisan) sebelumnya, dan atau kemampuan mengembangkan dan menambah luasan kepemilikan lahan sebagai konsekuensi keberhasilan usahatannya. Kedua penyebab tersebut sama-sama berkaitan dengan kemampuan manajerial usaha pertanian sebagaimana pengelolaan bisnis-bisnis lainnya.

Pada umumnya petani maju memiliki visi yang lebih baik berkaitan dengan usahatannya; bahwa menjalankan usaha pertanian bukan hanya kegiatan usaha rutin yang harus dijalani, melainkan sebagai pilihan hidup yang membutuhkan kreativitas dan prasyarat bisnis lainnya. Para petani maju adalah mereka yang berani menanggung resiko dan mampu keluar dari situasi yang membelenggu dinamika dan kreativitas usaha. Mereka menjalankan usaha tani sebagaimana bisnis lainnya dengan prinsip-prinsip bisnis, dan bukan semata menjalankan usahatani sebagai kegiatan budaya terkait dengan kegiatan turun temurun yang telah dilakukan nenek moyangnya. Pengamatan secara acak menunjukkan bahwa petani maju dan sukses kebanyakan yang bergerak dalam usaha pertanian yang memiliki kekhasan seperti tanaman hias, ikan hias, komoditas perkebunan seperti karet, kopi, lada, atau petani yang mengelola lahannya dengan beragam komoditas yang memiliki nilai jual yang baik. Hal tersebut berbeda dengan para petani tanaman pangan yang menunjukkan keterampilan pengelolaan usahatani yang sangat beragam. Karena besarnya prosentase petani Indonesia yang mengusahakan pertanian tanaman pangan, maka jumlah petani miskin banyak yang bergerak di sektor ini.

Pertanian adalah kegiatan usaha yang sama saja dengan usaha lainnya, di dalamnya bekerja kaidah-kaidah bisnis seperti pengambilan keputusan, pengelolaan sumberdaya, tuntutan untuk menciptakan nilai tambah, ke-uniq-an produk, ke-pioniran, juga dinamis. Jika kaidah tersebut dijalankan maka pertanian dapat mensejahterakan petaninya. Beberapa contoh aplikasi kaidah bisnis tersebut antara lain adalah :

- Menuntut daya inovasi, ke-pioniran, juga keunikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh kisah sekelompok pemuda yang pertama kali memperkenalkan buah Melon di Indonesia tahun 1980-an. Juga kisah petani yang pertama mengintroduksi kultivar baru tanaman hias Aglonema di tahun 2000-an. Daya inovasi dan ke-pionirannya berbuah kesejahteraan bagi yang bersangkutan.
- Berlaku kaidah efisiensi, produktivitas dan nilai tambah. Sama dengan bisnis lainnya, pertanian adalah kegiatan pengelolaan sumberdaya untuk memperoleh nilai tambah. Keberhasilan optimal akan diperoleh jika pengelolaan dilakukan dengan efisien, produktivitas yang tinggi dan nilai tambah yang tinggi pula.
- Menuntut kemampuan leadership dan manajerial. Pertanian dalam skala yang paling kecil sekalipun tidak dapat dikerjakan sendiri, tetapi harus dikerjakan oleh lebih dari satu orang, sehingga membutuhkan kemampuan leadership dan manajerial si petaninya. Pada skala yang lebih besar kemampuan tersebut akan lebih menonjol dan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Leadership dibutuhkan dalam mengelola para pekerja yang digunakan. Manajerial dibutuhkan untuk mengelola semua sumberdaya yang dikerahkan mulai dari manajemen personalia, keuangan, pemasaran, produksi, persediaan dan sebagainya.
- Butuh informasi akurat dan teknologi. Bagi petani /pelaku bisnis pertanian, disamping kemampuan penguasaan teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan, juga dituntut penguasaan atas informasi yang akurat. Bagi komoditas hortikultura (sayuran) yang perubahan harganya harian, informasi harga sangat penting bagi penentuan waktu panen dan tanam.

Oleh karena itu, salah satu masalah sekaligus tantangan pembangunan pertanian selama ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan petani agar mengimplementasikan kaidah bisnis dalam usahatani. Peningkatan keterampilan usahatani petani dapat dilakukan baik melalui penyuluhan pertanian maupun melalui peningkatan keterpaparan petani terhadap informasi pembangunan pertanian. Dengan demikian petani dapat mengambil keputusan penting terkait komoditas pertanian yang layak diusahakan, karena diprediksi akan memberi keuntungan yang besar serta resiko yang terkontrol.

C. Ruang Lingkup dan Dimensi Kesejahteraan Keluarga Petani

Kesejahteraan keluarga petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Namun jika merujuk UU No 10 Tahun 1992 (UU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera), keluarga sejahtera dimaknai secara luas yaitu: *" keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan"* Mengingat luas dan lebarnya rentang kualitas kebutuhan dasar individu dan keluarga, maka dalam definisi operasionalnya, kesejahteraan seringkali direduksi menjadi sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik dasar minimal seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Pengukurannya pun seringkali hanya dilakukan secara objektif, padahal kesejahteraan menyangkut aspek persepsi individu atau keluarga terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan pokoknya. Oleh karenanya sekarang dikembangkan pengukuran kesejahteraan keluarga dengan menggunakan dua dimensi; objektif dan subjektif. Hal tersebut didukung fakta di lapang bahwa antara kesejahteraan objektif

dan subjektif seringkali tidak searah. Individu atau keluarga yang menurut pengukuran objektif telah sejahtera belum tentu secara subjektif telah merasa demikian, dan sebaliknya.

Kesejahteraan keluarga petani merupakan output dari proses pengelolaan sumberdaya keluarga dan penanggulangan masalah yang dihadapi keluarga petani. Proses tersebut terangkum secara terpadu sebagai ketahanan keluarga, yang menurut UU No 10 Tahun 1992 didefinisikan sebagai : "Kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin". Kesejahteraan terkait dengan keberfungsian keluarga. Merujuk teori Parson, keluarga sebagai sistem akan berfungsi dan berkelanjutan manakala menjalankan fungsi *adaptasi* (perolehan sumberdaya dari luar keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga), fungsi dalam penentuan tujuan (goal attainment), fungsi *integrasi* (pemeliharaan ikatan dan solidaritas dan melibatkan elemen tersebut untuk mengontrol dan memelihara sistem serta mencegah gangguan utama dalam sistem keluarga) mengalokasikan sumberdaya, dan fungsi *latency* (proses dimana energi disimpan di didistribusikan dalam sistem keluarga). Manakala keempat fungsi tersebut tidak berjalan dalam keluarga petani, maka kesejahteraan keluarga sulit untuk dicapai.

Kesejahteraan keluarga berhubungan dengan keberfungsian keluarga. Keluarga yang bisa menjalankan beragam fungsi yang diembannya, terutama fungsi ekonomi maka memiliki peluang yang besar untuk sejahtera, dan juga menjalankan fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan dan pendidikan anak. Mengacu Deacon & Firebough (1988) paling tidak terdapat dua fungsi keluarga yaitu fungsi instrumental dan fungsi ekspresif. Fungsi instrumental berkaitan dengan fungsi memperoleh sumberdaya eksternal seperti pendapatan dan akses ekonomi lainnya serta dukungan dari luar. Keberfungsian instrumental berkaitan dengan keberfungsian ekspresif yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, interaksi dalam keluarga, juga pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan kesulitan dan tekanan ekonomi keluarga mempengaruhi interaksi suami istri seperti timbulnya kekecewaan bahkan kebencian antar pasangan yang pada akhirnya berdampak terhadap buruknya pengasuhan anak (*harsh parenting* dan *explosive discipline*). Kesulitan dan tekanan ekonomi yang dialami keluarga petani miskin menyebabkan terbatasnya pilihan hidup. Seluruh fokus perhatian keluarga adalah bagaimana untuk bisa survive. Bahan komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga menjadi terbatas, sehingga terkadang hidup menjadi terasa sepi.

Pengukuran kesejahteraan keluarga meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif. Aspek kualitatif kesejahteraan bisa dicerminkan oleh serangkaian indikator sosial psikologis seperti ketrentaman, kepuasan, kebahagiaan, kebebasan (termasuk kebebasan dari rasa takut, cemas, resah, gelisah), harapan, dan kepastian. Pada dasarnya indikator tersebut terkait satu sama lainnya, seperti rasa tentram dan aman terkait dengan aspek kepastian yang di dalamnya juga terdapat aspek harapan. Walaupun tidak ada yang bisa menjamin kepastian di dunia ini, namun derajat kepastian dalam memperoleh pendapatan untuk penghidupan, berbeda antara berbagai sektor pekerjaan. Menjadi petani berhadapan dengan resiko usaha yang diakibatkan berbagai faktor, diantaranya faktor alam yang sering kali tidak dapat diprediksi. Beban pertanian menjadi semakin berat manakala petani tidak pernah tahu bahkan tidak pernah bisa memprediksi berapa harga satuan hasil panen yang akan diterima, karena terbatasnya akses dan informasi pasar. Dengan banyaknya faktor yang tidak dapat dikontrol dalam usaha pertanian, menyebabkan terlalu besar unsur ketidakpastian dalam usaha tani, sehingga sulit untuk merasa aman untuk berusaha tani.

Berkaitan dengan ketidakpastian dan besarnya resiko usahatani, saya senantiasa teringat percakapan di suatu sore yang indah dengan seorang petani yang dianggap maju di salah satu sentra produksi hortikultura di Bandung Selatan. Petani tersebut dengan menerawang dan nada pasrah, bergumam : "ternyata bertani

itu tidak bedanya dengan berjudi". Sebuah pemaknaan yang lahir dari akumulasi pengalaman pahit dimana akhir dari perjuangan berusahatani selama berbulan-bulan yang hasilnya ditunggu-tunggu dengan penuh harap dan doa, adalah sebuah ketidakpastian yang seringkali berakhir mengecewakan. Tidak ada yang bisa mengontrol dan memberi "sedikit saja kepastian" harga saat panen apalagi panen raya. Bahkan tidak jarang terjadi situasi yang "mengenaskan" saat para petani dengan tangannya sendiri menghancurkan tanamannya yang hendak dipanen, karena biaya pikul dan angkut lebih mahal dibandingkan harga komoditas tersebut. Petani (terutama petani kecil) sangat membutuhkan perlindungan, karena dengan situasi, kondisi dan beragam keterbatasannya, tidak mungkin dituntut untuk memperjuangkan kedaulatannya sendiri.

D. Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan

Kesejahteraan keluarga terkait dengan pemenuhan salah satu kebutuhan pokok yaitu pangan, sehingga kesejahteraan keluarga paralel dengan ketahanan pangan keluarga. Konsep ketahanan pangan keluarga (rumah tangga) mengacu pada pengertian adanya kemampuan keluarga dalam mengakses pangan secara cukup untuk mempertahankan kehidupan anggotanya yang aktif dan sehat. Dalam situasi krisis ekonomi maka akses terhadap pangan akan terancam. Memaksimalkan pendapatan keluarga tidak selalu merupakan jaminan akan terpenuhinya ketahanan pangan untuk semua anggota keluarga. Demikian pula halnya dengan tercapainya ketahanan pangan nasional, tidak berarti tiada masalah dalam ketahanan pangan keluarga. Distribusi pangan yang tidak merata menjadi kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Tampaknya keluarga miskin pasti akan mengalami ketidakamanan pangan, tetapi mereka yang rawan pangan belum tentu hanya dari golongan miskin. Hal tersebut terjadi karena batas kemiskinan di Indonesia mungkin ditetapkan dengan *cut-off point* terlalu rendah, sehingga rumah tangga miskin sebenarnya sudah masuk kategori sangat miskin dan mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebenarnya sudah sangat miskin. Fenomena tersebut menjelaskan *hunger paradox* yaitu konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dimana telah mantapnya ketahanan pangan nasional (yang dicerminkan oleh ketersediaan kalori dan protein di atas angka kebutuhan gizi), namun kelaparan atau kekurangan gizi masih terjadi di mana-mana. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya mereka yang mengalami rawan pangan bukan hanya golongan miskin, tetapi juga mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian.

Ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensi yaitu meliputi mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Secara ringkas ketahanan pangan sebenarnya hanya menyangkut tiga hal penting yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan tergantung pada sumberdaya alam, fisik, dan manusia. Pemilikan lahan yang ditunjang oleh iklim yang mendukung dan disertai dengan SDM yang baik akan menjamin ketersediaan pangan yang kontinyu. Sementara itu akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup. Dan konsumsi pangan akan sangat menentukan apakah seluruh anggota keluarga nantinya bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Departemen Pertanian yang kini memiliki Badan BIMAS Ketahanan Pangan mempunyai tugas berat untuk merealisasikan ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan regional, dan ketahanan pangan keluarga, terutama keluarga petani miskin yang sehari-hari bekerja berkaitan dengan penyediaan pangan, namun mengalami rawan pangan. Seyogyanya Badan ini tidak hanya memfokuskan pada dua ketahanan pangan yang pertama (nasional dan regional), tetapi juga harus memperhatikan masalah-masalah dalam ketahanan pangan keluarga. Sebab kalau tidak, *hunger paradox* pasti akan terjadi.

E. Coping Mekanisme Keluarga Petani

Dalam menghadapi keterbatasan sumberdaya dan pendapatan, keluarga petani miskin melakukan coping dengan beragam strategi misalnya dual-earner, pola nafkah ganda, mencari dukungan sosial, sampai menurunkan kualitas hidup. Bekerja bagi istri petani merupakan keharusan, bahkan dalam kondisi tertentu bukan hanya istri yang ikut bekerja di pertanian, melainkan melibatkan sebanyak mungkin anggota keluarga untuk bekerja. Selain itu coping strategi yang lainnya adalah dengan pola nafkah ganda yaitu dalam waktu yang sama bekerja di bidang lain misalnya sebagai tukang, berjualan kecil-kecilan, dsb.

Survival strategi merupakan gambaran umum keluarga petani miskin, dan survival strategi yang paling berat adalah dengan melakukan strategi tutup lubang gali lobang. Kehidupan sehari-hari dikejar-kejar beban bagaimana melunasi utang dengan membuat utang baru. Berbaik-baik dan menitipkan diri kepada pengutang adalah strategi agar tidak ditagih hutang selama mungkin, walau tidak berani berharap untuk dibebaskan hutangnya. Hidup selalu dalam kondisi "berakit-rakit ke hulu terus".... walau tetap berharap dan berdoa agar akhirnya mendapat "berenang-renang kemudian"

Spirit of survival merupakan pola umum keluarga petani untuk bertahan hidup dengan mengoptimalkan apa yang dimiliki dan atau bisa diakses di lingkungan serta mereduksi kualitas kebutuhan hidup. Kebutuhan akan baju baru menjadi sangat minimal, yaitu paling satu tahun sekali hanya untuk ikut memeriahkan hari raya agama, sedangkan baju sehari-hari cukup dengan menggunakan baju "kebesaran" berkebuhan yang lusuh, kotor dan penuh tambalan. Mengkombinasikan pangan yang ada untuk membuat menu baru biasa dilakukan keluarga petani untuk menemukan nikmatnya makan. Asal ada sedikit sambal (terkadang hanya sambal goang dari ulekan cabe rawit dan garam) makan nasi sudah terasa nikmat. Alih-alih membayangkan bagaimana rasanya beragam snack kelas atas yang menghiasi televisi, cukup dengan menemukan kerupuk kaleng yang secara bergantian dimakan dengan mentimun, itulah snack kebanggaan para petani saat mengaso di sawah.

Keberhasilan coping mekanisme di keluarga tani terkait dengan sumberdaya yang dimiliki dan atau diakses keluarga tani tersebut. Sumberdaya coping adalah segala sesuatu yang dimiliki keluarga baik bersifat fisik maupun non fisik untuk membangun perilaku coping. Sumberdaya coping bisa bersifat subjektif sehingga perilaku coping bervariasi pada setiap orang. Menurut Friedman (1998), terdapat dua tipe strategi coping keluarga yaitu: *intra familial* (contohnya mengandalkan kemampuan diri sendiri, menggunakan humor, musyawarah, memahami suatu masalah, memecahkan masalah bersama, fleksibilitas peran, normalisasi) dan *ekstrafamilial* (contohnya mencari informasi, menjalin hubungan aktif, mencari dukungan social, mencari dukungan spiritual). Sedangkan menurut Lazarus & Folkman (1984) secara umum strategi coping bisa dibedakan antara yang berfokus pada masalah (berfikir keras dan melakukan usaha mengubah keadaan, mencari dukungan dari pihak luar), dan berfokus pada emosi (menciptakan makna positif, menumbuhkan kesadaran, mengendalikan diri, menjaga jarak agar tidak terkungkung dalam masalah, menghindarkan atau melarikan diri dari masalah). Strategi coping berfokus emosi biasanya dilakukan manakala keadaan sulit diubah, atau tidak memiliki daya dan tenaga untuk mengubahnya.

Strategi *coping* keluarga petani miskin untuk memperoleh ketahanan pangan dilakukan sesuai tahapan tekanan ekonomi yang dihadapi. Pertama-tama mereka akan mengurangi pangan sumber protein yang harganya mahal, kemudian mengurangi frekuensi makannya dan mencari bahan pangan konvensional yang dalam situasi normal jarang dimakan. Sesuai teori Maslow, maka upaya memenuhi kebutuhan fisiologis (pangan) adalah yang pertama kali harus dilakukan untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya anggota keluarga yang selama ini tidak mencari nafkah (anak-anak, orang tua, dan kaum perempuan) mulai terjun

bekerja apa saja untuk mendapatkan upah tunai. Bila hal ini masih tidak memecahkan masalah, maka mereka mulai menjual aset yang dimilikinya, dan langkah terakhir adalah sebagian anggota keluarga akan melakukan migrasi mencari nafkah ke luar daerah. Mekanisme *coping* untuk mengatasi rawan pangan seperti ini tampaknya bersifat universal dan dapat terjadi di mana saja.

Dalam situasi krisis, perempuan akan mengambil peran yang lebih besar untuk menjamin terpenuhinya ketahanan pangan rumah tangga. Perempuan akan terlibat langsung dalam proses produksi dan mengontrol pemanfaatan sumberdaya sehingga gizi seluruh anggota keluarga terpenuhi. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *Commonwealth Secretariat Engendering Adjustment in the Nineties* menyebutkan bahwa perempuan di seluruh dunia memainkan peran ganda yakni sebagai ibu, sebagai pengatur rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga (*family's basic need*), sebagai produsen dan kontributor penghasilan keluarga, dan sebagai pengatur organisasi kemasyarakatan yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Inilah yang dikenal sebagai Empat Peran Perempuan.

Banyak penelitian membuktikan bahwa perempuan, khususnya di negara sedang berkembang, terlibat dalam pekerjaan yang sangat ekstensif dari segi waktu. Mereka adalah ibu rumah tangga yang sekaligus juga pencari nafkah untuk mendukung ekonomi keluarga. Pekerjaan domestik seperti memelihara anak dan mengatur rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari peran besar perempuan yang melaksanakan tugas tersebut tanpa pamrih. Di pedesaan perempuan secara aktif terlibat dalam kegiatan pertanian subsisten (untuk mencukupi kebutuhan keluarga sendiri). Dalam sistem pertanian subsisten tersebut peran perempuan tidak dihargai dalam bentuk upah, tetapi jelas bahwa mereka telah melakukan aktivitas yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Sementara itu kaum pria yang lebih banyak menekuni pertanian *cash crop* akan memperoleh uang tunai yang diharapkan dapat digunakan untuk menopang kesejahteraan keluarga kalau tidak terjadi mis-alokasi pendapatan.

Kebijakan dari suatu pemerintahan yang kurang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan melahirkan *social cost adjustment* yang harus dipikul oleh kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut misalnya: pengurangan atau penghilangan subsidi pangan, kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga bahan-bahan pokok, pemangkasan biaya pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Perempuan dipaksa untuk melakukan *coping mechanism* dengan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mendapatkan tambahan penghasilan sehingga kebutuhan seluruh anggotanya terpenuhi.

Konsep rantai pangan menjelaskan bagaimana sekuensi-sekuensi yang terjadi sampai pangan berada di tingkat rumah tangga dan menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. Dalam konteks rantai pangan ini perlu terlebih dahulu diperkenalkan istilah *sex sequential* dan *sex segregated*. Apakah di dalam siklus produksi pangan tertentu terdapat peran yang berbeda yang harus dipikul oleh perempuan dan pria (*sex sequential*)? Atau apakah perempuan dan pria masing-masing bertanggung jawab terhadap siklus produksi untuk komoditi yang berbeda (*sex segregated*)? Pada umumnya jika perempuan memasuki peran yang dulunya hanya dilakukan oleh pria, maka *rewards*-nya selalu lebih rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa berbagi peran tidak mendatangkan masalah sama sekali bagi perempuan dan pria, tetapi berbagi *rewards* itu urusan nanti.

Di Bangladesh *sex sequential* dilakukan dalam proses produksi padi yaitu pria melakukan pekerjaan di sawah atau ladang, perempuan bertugas dalam proses pascapanen, dan dilanjutkan lagi dengan peran pria dalam pemasaran hasil. Sementara di Gambia *sex segregated* dilakukan dalam bentuk pria bertanggung jawab untuk proses produksi sorghum, sedangkan perempuan dalam produksi padi secara tradisional. Kasus di Gambia ini secara jelas menggambarkan peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yakni sebagai produsen padi.

Mengingat demikian besarnya peran perempuan dalam ketahanan pangan rumahtangga, maka kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan perempuan adalah sangat penting. Khusus di bidang pertanian maka pemberian kredit seperti KUT (Kredit Usaha Tani) dan P4K (Peningkatan Pendapatan Petani Kecil) seyogyanya juga memberi kesempatan kepada perempuan yang mungkin selama ini hanya bergerak di pola pertanian subsisten.

F. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga petani ?

Pembangunan pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan pembangunan pertanian bertujuan untuk mensejahterakan petani. Inti upaya mensejahterakan petani adalah membuat pertanian dan petani maju. Sehingga paradigma baru pertanian di Abad 21 adalah dengan menetapkan keberdayaan petani sebagai salah satu fokus pembangunan pertanian. Sedangkan focus pembangunan pertanian lainnya adalah daya saing produk, dan kelestarian lingkungan. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan paradigma baru pertanian Abad 21 adalah melalui :

1. Salah satu upaya dalam mewujudkan keberdayaan petani dapat dilakukan melalui *Employment shifting*. Beban sektor pertanian dengan jutaan petani gurem harus dikurangi. Ini berarti industri nasional harus bergerak dengan laju yang lebih cepat, dan investasi harus segera masuk untuk kemudian menyerap tenaga-tenaga kerja. Tanpa *employment shifting*, yang terjadi adalah bertambahnya kegureman petani yang akan semakin memperlihatkan betapa terpuruknya petani-petani kita.

Keberdayaan petani dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan membangun ekosistem penciptaan kesejahteraan petani melalui penciptaan kapasitas untuk mengkonsumsi. Secara sederhana penciptaan kapasitas untuk mengkonsumsi dilakukan melalui tiga cara yaitu : 1) upaya peningkatan pendapatan petani dengan harga-harga barang kebutuhan yang tetap, 2) hanya menciptakan barang-barang dengan kualitas baik namun dengan harga yang jauh lebih ekonomis, atau 3) meningkatkan pendapatan petani sekaligus menciptakan barang kebutuhan dengan harga yang jauh lebih ekonomis. Pemahaman mengenai kebutuhan barang dan pelayanan yang baik bagi kalangan petani kelas bawah dapat menjadi dasar pengembangan pasar yang menguntungkan beragam pihak. Dari sudut pandang rantai produsen-konsumen, selama ini petani memiliki posisi yang kurang menguntungkan; ia sebagai produsen pertama yang menjual produk pertanian dengan harga paling murah, namun karena petani kebanyakan tinggal di pedesaan, dia menjadi konsumen akhir yang membeli barang dengan harga paling tinggi. Pengembangan pasar dan pelayanan barang dan jasa bagi kalangan petani miskin hanya dapat berjalan manakala ada kepercayaan sekaligus memberi kesempatan masyarakat kelas bawah untuk membangun "dignity" nya serta memberi kesempatan untuk memilih.

Prahalad (2005) menunjukkan banyaknya kesempatan dan alternatif untuk mensejahterakan masyarakat kelas bawah sekaligus menguntungkan private sektor yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat kelas bawah atau yang disebut "The Bottom of Pyramid". Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meringankan beban masyarakat miskin sehingga bisa menjalankan usahanya dengan lebih longgar. Penciptaan pasar bagi kelas bawah yang jumlahnya sangat besar, dapat membuka keran lapangan usaha yang menguntungkan di segala bidang kebutuhan pokok manusia: pangan, pendidikan, kesehatan, barang kebutuhan rumah tangga, bahkan inovasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kesungguhan memecahkan masalah masyarakat kelas bawah yang proporsinya cukup besar, membuahakan kesejahteraan sekaligus keuntungan bagi sector swasta. Menemukan permasalahan, mengetahui dan memperoleh solusi yang unik; menciptakan barang berkualitas namun dengan harga terjangkau dengan system pembayaran yang baik, didasari kepercayaan dan pengembangan *dignity* keluarga miskin.

2. Sementara itu daya saing produk pertanian harus selalu diperbaiki. Lembaga-lembaga riset pertanian di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan setiap tahun menyerap anggaran cukup besar jangan hanya jadi macan kertas. Lembaga-lembaga riset depertemen harusnya lebih banyak menghasilkan karya terapan yang bisa langsung diimplementasikan di lapangan oleh petani-petani kita. Hasil riset yang hanya ditumpuk-tumpuk menjadi laporan atau makalah seminar, tidak akan pernah mensejahterakan petani Indonesia.

Upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian hendaknya terus dilakukan. Contohnya adalah eksplorasi nilai tambah secondary crops yang memiliki potensi sumbangan dalam memperbaiki kehidupan penduduk desa miskin, serta sebagai sumber bahan mentah bagi percepatan atau pembukaan pengembangan industri pengolahan. Tantangannya adalah menciptakan nilai tambah dari secondary crops yang bernilai murah dan sumberdaya yang memadai untuk digunakan sebagai bahan mentah industri, melalui kebijakan dan strategi yang memadai. (Bourgeois, 2006).

Peningkatan daya saing produk pertanian berkaitan dengan produktivitas usaha tani yang dipengaruhi oleh ketersediaan, kemudahan memperoleh, serta kualitas sarana produksi pertanian; akses dan penerapan inovasi yang dihasilkan penelitian pertanian; sarana dan prasarana serta infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan gudang penampungan hasil panen dan penyimpanan sementara. Masih banyak celah-celah peningkatan produktivitas pertanian yang sekarang ini terabaikan di lapangan. Contohnya adalah hasil penelitian efisiensi penggunaan pupuk yang telah ditemukan dalam kurun waktu yang lama, ternyata masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada petani. Masih terus ditemukan kasus dimana petani kesulitan memperoleh benih bermutu, demikian halnya kesulitan memperoleh pupuk yang menyebabkan terhambatnya penanaman.

3. Menyangkut kelestarian lingkungan, maka sudah saatnya pemerintah memberi apresiasi kepada petani-petani yang mempraktekkan pola pertanian ramah lingkungan. Pemanfaatan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida akan lebih baik bagi lingkungan hidup kita. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita saat ini, tetapi juga untuk anak cucu kita di tahun-tahun mendatang. Rusaknya lingkungan berarti hancurnya kehidupan di masa datang, dan generasi saat ini akan terus dikutuk oleh anak cucu kita nanti apabila kita tidak berusaha menerapkan cara hidup yang lebih bersahabat terhadap lingkungan.

Paradigma pertanian baru Abad 21 diterjemahkan dalam kebijakan dan serangkaian program-program pembangunan pertanian. Sangat penting bagi kita semua, termasuk para birokrat pembuat kebijakan, untuk mengubah *mind set* bahwa pertanian identik dengan kemiskinan. Negara-negara lain banyak yang hidup makmur karena memiliki sistem pertanian yang kuat. Negara-negara tetangga kita seperti Thailand, Cina, dan Malaysia dapat berjaya dengan produk pertaniannya. Demikian pula Amerika Serikat, hingga kini tetap menjadi eksportir pangan-pangan utama ke berbagai negara. Terkait dengan temuan potensi secondary crops dalam perbaikan kehidupan petani, ESCAP (2004) menunjukkan bahwa pertanian memiliki potensi pertumbuhan tertinggi bagi pemberantasan kemiskinan dalam jangka pendek dan menengah di beberapa Negara berkembang yang memiliki wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduknya miskin dan kehidupannya tergantung kepada pertanian.

Dengan memperhatikan persoalan-persoalan besar yang akan muncul bila pemerintah salah membuat kebijakan yang menyangkut nasib petani, maka bangsa ini harus mempunyai *grand design* tentang pembangunan pertanian yang menguntungkan petani dan tidak menyengsarakan rakyat. Sektor pertanian adalah andalan bangsa kita, oleh sebab itu ciptakan kemakmuran bangsa melalui pembangunan pertanian yang tepat. Kebijakan pertanian yang tepat adalah kebijakan yang berpihak petani. Oleh karena itu

kebijakan di bidang ini terlebih dahulu harus digodok dengan matang, dan diperhatikan dampak positif-negatifnya baik bagi petani maupun masyarakat. Salah satu teori tentang kelaparan menyebutkan bahwa *hunger* adalah bencana kemanusiaan yang dapat terjadi bilamana kebijakan pertanian dirumuskan secara tidak tepat.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga gabah ternyata tidak serta merta menambah kesejahteraan petani. Banyak di antara mereka yang terjatuh hutang dengan tengkulak, dan akhirnya harga gabahpun lebih banyak ditentukan para tengkulak. Di satu sisi tengkulak adalah penolong petani, di sisi lain tengkulak pula yang memiskinkan petani. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat tengkulak hanya Rp1700 per kg, sementara harga pembelian pemerintah (HPP) seharusnya Rp2000 per kg. Untuk harga beras yang telah ditetapkan Rp4000 per kg di gudang BULOG, tengkulak hanya menghargai Rp3500. Persoalan yang dihadapi pemerintah setelah menetapkan HPP (pada tahun 2007) adalah bahwa kualitas gabah yang dihasilkan petani sangat beragam. Oleh sebab itu tidak semua gabah petani kemudian berhak untuk dihargai sesuai HPP. Hal ini yang terkadang menimbulkan kekecewaan petani.

Kebijakan pertanian menyangkut nasib jutaan petani. Oleh sebab itu kebijakan yang keliru akan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang tidak mustahil akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Apabila kebijakan pemerintah yang baikpun ternyata tidak dapat mengangkat kesejahteraan petani, apalagi kalau kebijakan tersebut tidak berpihak petani. Jadilah petani-petani Indonesia selalu menjadi korban yang menderita termakan ijon para tengkulak, terlilit hutang, dan tidak mampu mengentaskan anggota keluarganya dari lingkaran kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan akan menghablur tanpa hasil, karena dampak positifnya tertutup oleh dampak negatif kebijakan lain yang tidak tepat. Kerja keras pemerintah akan tampak nihil karena orang miskin tidak berkurang tapi justru bertambah. Diharapkan kebijakan pertanian di masa datang bisa lebih fokus pada usaha-usaha memperbaiki kesejahteraan para pelaku pertanian karena sudah sangat lama para petani memimpikan hidup yang lebih sejahtera

Revitalisasi penyuluhan pertanian dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi dan peran penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Hal tersebut menjadi penting karena petani tidak dapat dibiarkan sendirian untuk memperoleh kedaulatannya. Hanya sedikit petani yang terpapar informasi dan perkembangan inovasi teknologi pertanian, sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan usahatani. Pada umumnya petani masih memerlukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan. Sebagai contoh masih banyak kita temui dimana petani belum menjalankan prinsip dan pengetahuan dasar dalam mencegah kehilangan tanah lapisan atas yang mengandung banyak hara. Di wilayah sentra produksi, banyak lahan pertanian (bahkan yang diusahakan petani maju) yang belum dikelola dengan baik, sehingga merugikan petani itu sendiri.

G. Kesejahteraan Petani di Era Otonomi

Pemangkasan wewenang Pusat dalam pengelolaan pembangunan merupakan tuntutan otonomi. Konon hal ini sudah disadari oleh *Founding Fathers* dan diakomodir dalam pasal 18 UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya tersendat-sendat karena awal tahun 1950-an bangsa Indonesia menghadapi bahaya disintegrasi bangsa sehingga kontrol Pusat terhadap daerah semakin diperketat. Di era Orde Baru upaya desentralisasi juga belum dapat diwujudkan karena pemerintah saat itu ingin mempercepat pembangunan ekonomi nasional sehingga terjadilah pemusatan aset-aset daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan menggeser paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dulu hanya bertumpu di Pusat, kini akan dikelola secara mandiri oleh daerah. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam, khususnya pertanian, diharapkan dapat mendorong kepala daerah dan jajarannya untuk memperbaiki kesejahteraan petaninya.

Otonomi daerah mengandung makna bahwa daerah mempunyai keleluasaan untuk merancang program pembangunan di daerahnya (termasuk pembangunan pertanian) dengan DAU sebagai dana *block grants* dari Pusat. Daerah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan mikro yang langsung berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan petani. Penetapan harga dasar gabah adalah kebijakan makro di tingkat nasional, daerah harus mampu merumuskan kebijakan mikronya. Bupati yang berpihak pada petani harus trampil menerapkan kebijakan pertanian yang menguntungkan petani. Untuk mengamankan kebijakan harga dasar pemda harus menyediakan APBD untuk melindungi harga dasar tersebut. Jangan sampai harga di tingkat petani dipermainkan oleh tengkulak. Apabila harga jatuh, pemerintah daerah berkewajiban membeli produk pertanian dengan harga sesuai harga dasar. Bahkan dana APBD untuk proteksi harga komoditi pertanian ini hendaknya tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga komoditi strategis lainnya yang menjadi andalan daerah seperti cabe, tembakau, kakao dll. Melindungi harga dasar komoditi pertanian di tingkat petani merupakan langkah sederhana namun langsung dirasakan. Pemerintah daerah sebelumnya harus bisa melakukan analisis *benefit cost ratio*, sehingga penetapan harga dasar untuk komoditi pertanian strategis benar-benar riil dan sesuai dengan analisis usaha di tingkat petani. Artinya, harga dasar yang ditetapkan tidak akan merugikan petani.

Selama ini fungsi penyangga harga ini diimban oleh BULOG/DOLOG dengan menahan atau melepas stok ke pasar. Harapannya adalah harga akan kembali normal karena mekanisme pasar akan segera berjalan. Pada kenyataannya, tengkulak lebih sakti dalam menentukan harga sehingga petani hanya pasrah menjual produknya dengan harga berapapun. Tidak aneh kalau pada akhirnya ada petani yang sampai hati membakar komoditi pertaniannya di ladang. Mungkin biaya panennya lebih besar daripada harga komoditinya, sehingga membakar cabe atau cengkih dirasakan lebih rasional. Kurang saktinya peran Bulog, terkait dengan fakta yang menunjukkan bahwa Bulog hanya menguasai secara fisik 5 - 6.5 % beras sebagai cadangan. Jadi bagaimana bisa mengamankan harga beras untuk menolong petani ?

Di salah satu kabupaten di Jawa Timur ada suatu kebijakan yang dianggap menguntungkan petani yakni pegawai negeri harus membeli beras petani setiap bulan dengan kualitas sesuai yang diinginkan. Dulu kebijakan beras untuk pegawai negeri seringkali dicibir karena beras yang diberikan tidak layak namun harganya mahal. Dengan sedikit sentuhan yang inovatif kebijakan baru tentang beras bagi pegawai negeri ini dapat diterima dengan lapang hati oleh para PNS. Bagi petani, jumlah PNS yang ribuan di tiap kabupaten adalah pasar potensial yang akan membantu harga dasar untuk tidak terus melorot karena ulah tengkulak. Kalau setiap bupati mempunyai perhatian besar pada nasib petani di daerahnya, maka kita tidak perlu khawatir terhadap masalah ketahanan pangan nasional, regional, atau rumahtangga. Petani akan selalu antusias dalam memproduksi karena birokratnya membuat kebijakan yang sangat mendukung. Pada akhirnya rakyat secara keseluruhan bisa menikmati produk-produk pertanian dengan harga yang layak. Tetapi yang lebih penting adalah visi pimpinan daerah yang bertekad untuk mensejahterakan kaum petani.

Banyak masalah pertanian dan petani yang membutuhkan bantuan dan penyelesaian dari pihak pemerintah daerah, baik menyangkut infrastruktur, ketersediaan saprotan, pemasaran, dsb. Sebagai contoh keberfihakan pemda dalam penyelesaian masalah petani adalah setelah mengetahui bahwa air menjadi kunci penting bagi keberhasilan produksi padi di sawah, maka bupati yang berpihak petani ini segera membenahi irigasi di daerahnya. Temuannya sungguh ironis karena fasilitas irigasi yang ada ternyata 60% dibangun di jaman Belanda. Untung Belanda dulu berbaik hati membangun sarana pengairan ini. Kalau pengamatan seperti ini dilakukan oleh setiap kepala daerah, maka para petani pasti akan tersenyum bahagia karena masalah air terpecahkan dengan segera. Di tempat lain, masalah air diatasi dengan mengeruk kembali embung/danau yang semakin dangkal dan tak berfungsi lagi sebagai tandon air. Pemerintah daerah menyediakan peralatan berat untuk mengeruk embung/danau secara gratis, sedangkan masyarakat hanya diminta menyediakan bahan bakar dan biaya operatonya.

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian yang lebih ramah lingkungan, pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan dengan serius pemanfaatan sumberdaya lokal untuk produksi pupuk organik/kompos. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan enceng gondok sebagai bahan baku utama. Selama ini enceng gondok telah menjelma menjadi gulma. Terlebih lagi dengan bantuan teknologi dapat membuat kompos dengan bentuk *granule* sehingga mudah disebar di sawah seperti halnya petani menyebarkan pupuk urea. Pemanfaatan pupuk organik tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya mengganti pupuk anorganik, sebab bisa-bisa justru menurunkan produksi pertanian. Pengurangan pupuk anorganik untuk kemudian diganti pupuk organik diusahakan untuk tidak mengganggu kuantitas produk yang dihasilkan. Penggunaan pupuk kompos bisa dimaknai petani telah berpartisipasi dalam memelihara lingkungan. Bayangkan kalau setiap kabupaten bisa mendirikan pabrik pupuk kompos dengan mendayagunakan limbah yang ada, maka biaya pertanian dapat ditekan, produksi tetap terjaga, dan lingkungan terpelihara. Jelas hal ini akan mendatangkan kemakmuran bagi petani dan masyarakat keseluruhan. Analisis yang dilakukan oleh *Bioaccess Indonesia Community* di Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kompos *granule* dan bahan limbah lain justru meningkatkan produksi padi 30% dan mengurangi biaya Rp300 ribu per hektar. Sayangnya banyak petani-petani yang sulit menerima hal tersebut, karena penyuluhan-penyuluhan yang telah berjalan puluhan tahun terlalu menekankan pentingnya teknologi modern seperti pupuk anorganik dan pestisida.

Kesejahteraan petani merupakan tantangan pemerintah daerah di era otonomi. Otonomi daerah hendaknya mendekatkan pemerintah kepada petani, menunjukkan kepedulian kepada petani dan pertanian, mempercepat pemecahan masalah petani dan pertanian. Dengan otonomi daerah Pemda memiliki posisi strategis dengan keleluasaan untuk menelorkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang semakin fokus, bisa menemukan komoditas unggulan sesuai potensi lokal, dan menemukan nilai tambah produk pertanian. Dengan otonomi, idealnya permasalahan yang dihadapi petani dan pertanian dengan cepat diketahui dan diberikan solusi yang memadai.

H. Penutup

Pada hakikatnya petani telah berjasa besar dalam penyediaan pangan nasional sehingga bangsa ini tidak mengalami kelaparan. Namun jasa petani ini tampaknya belum memperoleh apresiasi yang cukup karena banyak petani Indonesia yang masih harus bergelut meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup layak. Harapan besar dipikulkan di pundak pemerintah agar menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-petani. Pertanian adalah kegiatan usaha/bisnis yang sama saja dengan usaha lainnya, menuntut kaidah-kaidah bisnis seperti kepioneeran, efisiensi, dinamis, nilai tambah, keunikan produk. Jika kaidah tersebut dijalankan maka pertanian dapat mensejahterakan petaninya sebagaimana telah ditunjukkan sebagian kecil petani maju. Masalahnya adalah bagaimana mengawal, membimbing, serta menularkan kemampuan bisnis tersebut kepada banyak petani dengan beragam keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Demikian halnya dengan beragam prasyarat lainnya agar dalam usahatani dapat direduksi unsur ketidakpastian dan petani tidak berfikir bahwa berusahatani tidak ada bedanya dengan berjudi.

Bibliography

- Bourgeois, R. Lisa Svensson, M.L. Burrows. Ed. 2006. Farming a Way Out of Poverty. Forgotten Crops and Marginal Populations in Asia and The Pacific. Proceedings of the regional workshop on "Rural Prosperity and secondary Crops: Towards Applied Pro-poor Research and Policies in Asia and the Pacific". CAPSA Monograph No.48. ESCAP. United Nations. New York.
- BPS. 2004. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004. Buku 2: Kabupaten. Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia.
- Deacon, R.E., & Firebaugh, M.F. 1988. Family Resource Management Principles and Applications. Boston. Atlantic Avenue.
- Entang Sastraatmadja. 2006. Petani di Tanah Merdeka. Petani Center. Bogor.
- Friedman J. 1998. Family Nursing : Theory and Practice" 3rd ed. Appleton & Lange. California.
- Lazarus R.S., & Folkman S. 1984. Stress, Appraisal, and Coping. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Prahalad, C.K., 2005. The Fortune at The Bottom of The Pyramid. Eradicating Poverty Through Profits. Wharton School Publishing. USA.

